

**“DIPLOMASI KESEHATAN TIONGKOK MELALUI BANTUAN  
PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA”**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin*

**OLEH:**

**WIWIN NURPASARI**

**E061171306**

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

**HALAMAN JUDUL**

**DIPLOMASI KESEHATAN TIONGKOK MELALUI BANTUAN PANDEMI  
COVID-19 DI INDONESIA**

**OLEH:**

**WIWIN NURPASARI**

**E061171306**

**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen  
Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Hasanuddin*

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2023**

## HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : DIPLOMASI KESEHATAN TIONGKOK MELALUI BANTUAN  
PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

N A M A : WIWIN NURPASARI

N I M : E061171306

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 14 Agustus 2023



Mengetahui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Ishaq Rahman, S.IP, M.Si  
NIP. 197200282005011002

  
Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR  
NIK. 198909132020053001

Mengesahkan :

Ketua Departemen Hubungan Internasional,



  
Prof. H. Darwis, MA., Ph.D.  
NIP. 196201021990021003

## HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : DIPLOMASI KESEHATAN TIONGKOK MELALUI  
pBANTUAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA

N A M A : WIWIN NURPASARI

N I M : E061171306

DEPARTEMEN : HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Rabu, 9 Agustus 2023.

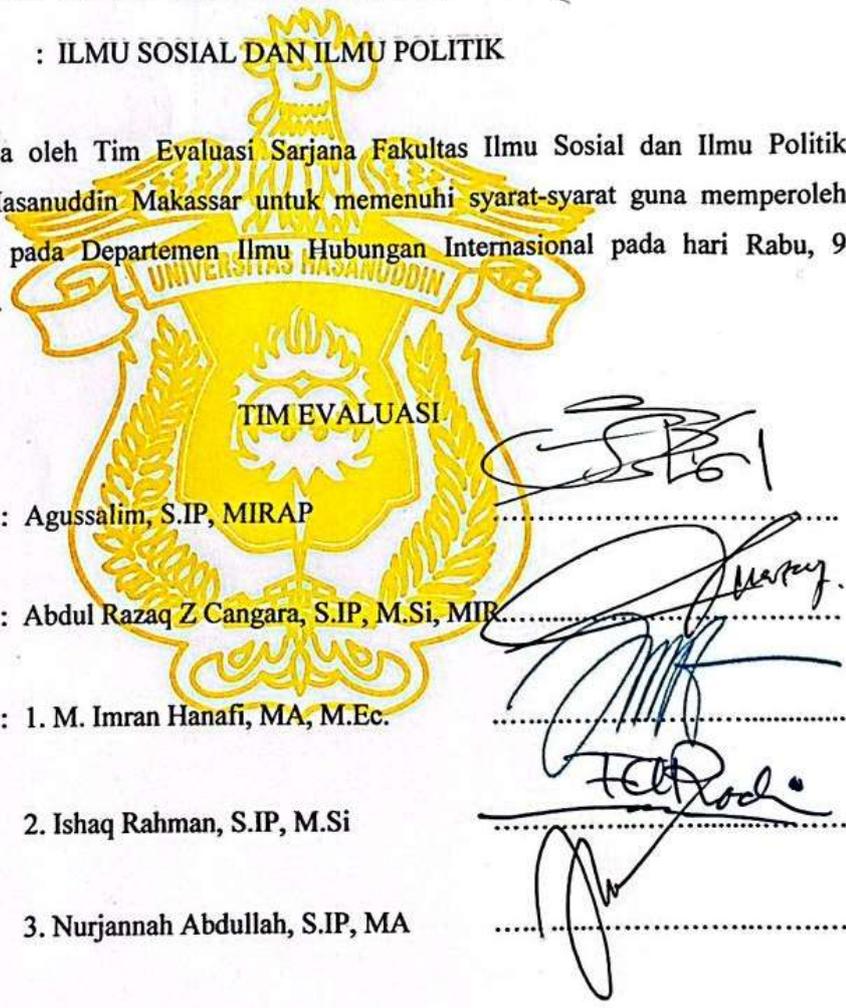
Ketua : Agussalim, S.IP, MIRAP

Sekretaris : Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

Anggota : 1. M. Imran Hanafi, MA, M.Ec.

2. Ishaq Rahman, S.IP, M.Si

3. Nurjannah Abdullah, S.IP, MA



## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wiwin Nurpasari

NIM : E061171306

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

### **“DIPLOMASI KESEHATAN TIONGKOK MELALUI BANTUAN PANDEMI COVID-19 DI INDONESIA”**

Adalah karya tulisan saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan orang lain dan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang menyatakan



(Wiwin Nurpasari)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada **Allah SWT** yang telah menganugerahi kita akal untuk berfikir dan telah menjadikan kita berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain. Atas segala rahmat dan karunia-Nya yang begitu berlimpah tercurah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “**Diplomasi Kesehatan Tiongkok melalui Bantuan Pandemi Covid-19 di Indonesia**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Dalam menyelesaikan penelitian ini, banyak pihak yang terlibat dalam membantu, menyemangati dan memberi inspirasi kepada penulis, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat:

1. Kepada **Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, beserta jajarannya.
2. Kepada Bapak **Prof. Drs. H. Darwis, MA.,Ph.D**, selaku Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin.
3. Kepada Bapak **Ishaq Rahman, S.IP, M.Si**, selaku pembimbing I dan bapak **Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR** selaku pembimbing II, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dan saran dalam proses penyusunan penelitian ini, serta atas ilmu yang diberikan semasa perkuliahan. Tidak lupa pula penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional atas segala ilmu dan bantuan administrasi selama proses perkuliahan hingga selesainya penelitian ini.
4. Kepada orang tua saya yang paling saya cintai dan hormati yaitu ayah saya **Paturusi** yang telah dipanggil sang pencipta sebelum saya menyelesaikan penelitian ini, dan Ibu saya tersayang **Hj. Andi Nurjannah, A.Ma**. Terima kasih untuk seluruh doa dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis hingga mampu menyelesaikan penelitian ini. Untuk semua pengorbanan dan cinta yang sampai saat ini

dan selamanya tidak akan mampu terbalas. Terima kasih untuk segalanya.

5. Kepada saudara saya satu-satunya, **Hardinah Nur.P** yang tiada hentinya memberi semangat kepada penulis dalam proses penyelesaian penelitian ini, serta selalu siap membantu penulis dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam proses perkuliahan, terima kasih karena telah bersedia mendengarkan keluh kesah penulis. Tetap saling menguatkan yah!. Tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada **Mahira Nur Azkia** yang selalu menghibur penulis pada saat lelah mengerjakan penelitian ini, sehat selalu ki nak.
6. Kepada yang terkasih, **Hendi Gunawan** yang telah kebersamai penulis selama 10 tahun terakhir, melewati masa sekolah, perkuliahan hingga menyelesaikan penelitian ini, terima kasih atas kesabaran dalam menghadapi segala keluh kesah penulis selama pengerjaan penelitian ini. Terima kasih karena telah menjadi *support system* terbaik.
7. Kepada cinta kasihku, **Grazea Mecca Gunawan** yang menjadi alasan terkuat penulis untuk menyelesaikan penelitian ini, terima kasih telah kebersamai proses yang panjang ini, semoga zea suatu saat bisa mencapai lebih dari apa yang mama capai hari ini.
8. Kepada saudari semasa perkuliahanku, **Sri Reski Amalia** terima kasih telah menjadi teman berbagi cerita semasa kuliah dan kegalauan semasa penyusunan penelitian ini. Terima kasih untuk semua masukan, kritikan serta semangat yang diberikan kepada penulis. Penulis selalu mengharapkan yang terbaik untukmu.
9. Kepada teman-teman **Liberte 2017**, terima kasih untuk semua kenangan selama proses perkuliahan, terima kasih telah berproses dan bertumbuh bersama. Terutama kepada **Ari** dan **Keluarga Marsudi (Mayang, Putri, Ulwi dan Risna)** terima kasih sudah menjadi teman dan pendengar yang baik selama masa perkuliahan.
10. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah turut mendoakan, memberikan dukungan serta motivasi dalam

penyusunan penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih. Akhir kalimat, diluar keterbatasan ilmu yang dimiliki penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis berharap penelitian ini akan tetap bermanfaat bagi pihak yang membacanya.

Makassar, 01 Agustus 2023

## **ABSTRAKSI**

**Wiwin Nurpasari, E061171306, “Diplomasi Kesehatan Tiongkok melalui Bantuan Pandemi Covid-19 di Indonesia” di bawah bimbingan Ishaq Rahman, S.IP,M.Si selaku pembimbing I dan Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR selaku pembimbing II, Departement Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepentingan Tiongkok dalam pemberian bantuan Covid-19 di Indonesia melalui diplomasi kesehatan, menganalisis strategi yang diterapkan serta tantangan yang dihadapi Tiongkok dalam pelaksanaan diplomasi kesehatannya. Jawaban dari tujuan penelitian kemudian dibingkai menggunakan konsep kepentingan nasional, diplomasi kesehatan dan bantuan luar negeri. Penelitian dilaksanakan melalui metode kualitatif dengan menggunakan data sekunder seperti jurnal, tesis, buku, dan tulisan ilmiah lainnya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan Tiongkok melalui diplomasi kesehatan dalam pemberian bantuan penanganan Covid-19 di Indonesia terdiri atas kepentingan politik dan ekonomi. Kepentingan politik mencakup usaha Tiongkok untuk memperbaiki citra negaranya yang tercoreng akibat penyebaran pandemi dan kepentingan ekonominya meliputi usaha Tiongkok untuk tetap menjaga agar proyek BRInya tetap berjalan di tengah pandemi. Strategi yang diterapkan Tiongkok untuk mencapai kepentingan tersebut yaitu penerapan konsep harmoni dan perdamaian dalam pemberian bantuan. Namun Tiongkok juga mengalami tantangan terutama fenomena setimen anti-Tiongkok di Indonesia yang telah ada dan semakin menguat di era pandemi.

**Kata Kunci:** Covid-19, Indonesia, Tiongkok, Diplomasi Kesehatan

## ABSTRACT

**Wiwin Nurpasari, E061171306, “*Tiongkok’s Health Diplomacy through the Assistance of Covid-19 Pandemic in Indonesia*”, under the guidance of Ishaq Rahman, S.IP, M.Si as first advisor, and Abdul Razaq Z. Cangara, S.IP, M.Si, MIR as second advisor, Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Hasanuddin University.**

This research aims to find out Tiongkok’s interest in providing the Covid-19 assistance in Indonesia through health diplomacy, analyze strategies applied, and challenges faced by Tiongkok in the implementation of its health diplomacy. The answers of the research objectives were then framed using the national interest concept, health diplomacy, and foreign assistance. The research was conducted through a qualitative method by using secondary data such as journals, thesis, books, and other scientific writings.

The results of this research showed that Tiongkok's interest through health diplomacy in providing handling assistance for Covid-19 in Indonesia consists of political and economic interests. Political interests included Tiongkok's efforts to improve its country's image which is tarnished due to the spread of the pandemic and its economic interests included Tiongkok's efforts to keep its BRI project running in the midst of a pandemic. Strategies applied by Tiongkok to attain these interests was the application of the concept of harmony and peace in providing assistance. However, Tiongkok also faced challenges, especially the phenomenon of anti-Tiongkok sentiment in Indonesia that has existed and was getting stronger in the pandemic era.

Keywords: Covid-19, Indonesia, Tiongkok, Health Diplomacy

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	. 1
B. Batasan dan Rumusan Masalah .....	. 8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>19</b>
A. Kepentingan Nasional .....	19
B. Diplomasi Kesehatan .....	24
C. Bantuan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional .....	29
D. Penelitian Terdahulu .....	37
<b>BAB III DIPLOMASI KESEHATAN TIONGKOK KE INDONESIA .....</b>	<b>41</b>
A. Kebijakan Luar Negeri Tiongkok dan Indonesia.....	41
1. <i>Health Silk Road</i> Tiongkok.....	41
2. <i>One Health</i> Indonesia .....	51
B. Pandemi Covid-19 di Indonesia.....	57
C. Bantuan Penanganan Pandemi Covid-19 Tiongkok ke Indonesia.....	64
<b>BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>79</b>
A. Kepentingan Tiongkok melalui Diplomasi Kesehatan dalam Pemberian Bantuan Penanganan Covid-19 di Indonesia .....	79
1. Politik.....	85

2. Ekonomi .....	91
B. Strategi Diplomasi Kesehatan Tiongkok dalam Pemberian Bantuan Penanganan Covid-19 di Indonesia .....	97
C. Tantangan Diplomasi Kesehatan Tiongkok dalam Pemberian Bantuan Penanganan Covid-19 di Indonesia .....	103
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>114</b>

## DAFTAR BAGAN

<b>Bagan 1.1</b> Kerangka Konseptual Penelitian .....	16
---	----

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1</b> Penelitian Terdahulu .....	39
<b>Tabel 2.2</b> Aktivitas yang Berkaitan dengan Diplomasi Kesehatan Tiongkok kepada Indonesia Tahun 2020-2021 .....	75

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> Peta <i>Belt and Road Initiative</i> (BRI) Tiongkok .....	46
<b>Gambar 3.2</b> Kasus Covid-19 di Indonesia Tahun 2020-2021 .....	58
<b>Gambar 3.3</b> Perubahan Citra Tiongkok di Tahun 2020 .....	86
<b>Gambar 3.4</b> Citra Tiongkok dalam Merespon Pandemi Covid-19.....	87
<b>Gambar 3.5</b> Peta Proyek Infrastruktur Utama BRI di Indonesia.....	94
<b>Gambar 3.6</b> Alasan Masyarakat Menolak Vaksin Covid-19 dari Tiongkok.....	108

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wabah virus Covid-19 atau *Severe Acute Respiratory Syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) pertamakali terkonfirmasi di kota Wuhan provinsi Hubei Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Pada tanggal 9 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) secara resmi mendeklarasikan virus Covid-19 sebagai pandemi yang menyebabkan terjadinya darurat kesehatan global serta menimbulkan kerugian dalam bidang sosial dan ekonomi (Feigin & Wiebers, 2020) (Velavan & Meyer, 2020).

Berdasarkan *update* data WHO pada 17 Januari 2021, secara global dilaporkan terdapat 4,7 juta kasus baru dalam seminggu terakhir, pada saat yang sama jumlah kematian akibat pandemi Covid-19 naik ke rekor tertinggi di angka 93.000. Lebih dari 2 juta orang saat ini telah kehilangan nyawa karena Covid-19. Untuk wilayah Amerika, Eropa dan Asia Tenggara menunjukkan penurunan dalam kasus baru, disisi lain Mediterania Timur, Afrika, dan Pasifik Barat melaporkan terjadi peningkatan kasus baru terutama di Pasifik Barat yaitu terjadi peningkatan kasus sebesar 14%. Namun demikian, semua wilayah tersebut melaporkan peningkatan kasus kematian baru. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 masih menjadi permasalahan global di bidang kesehatan yang berdampak besar ke berbagai sektor kehidupan. (WHO, 2021).

Di tengah pandemi Covid-19 yang terus menyebar luas ke banyak negara, persaingan geopolitik global juga terus meningkat, dua negara besar Tiongkok dan Amerika Serikat (AS) terlibat saling tuduh serta adu propaganda mengenai sumber asal virus tersebut (Akhli & Samhudi, 2020). Tiongkok dianggap mengambil langkah yang keliru dengan menutup-nutupi informasi kemunculan virus Covid-19. Presiden AS, Donald Trump menaikkan tensi persaingan dengan mengatakan Covid-19 sebagai *Chinese Virus*. Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo pun menyebut Covid-19 dengan istilah "*Wuhan Virus*". Selain tak henti-hentinya mengatakan *Chinese Virus*, serangan Trump juga mulai mengarah pada WHO, terutama Sekretaris Jenderal Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, yang diklaim sebagai kaki tangan Tiongkok. Tuduhan tersebut disebabkan oleh respon WHO yang dianggap lambat, permisif dan ikut menutupi kekeliruan yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok (Akhli & Samhudi, 2020).

Pihak pemerintah Tiongkok kemudian bereaksi keras dan tidak terima atas tuduhan pejabat AS, bahwa pihaknya menutupi dan menyembunyikan fakta penting mengenai wabah virus covid-19 dari penyelidik Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tiongkok menuding AS tidak memberikan kontribusi yang semestinya pada kerjasama internasional terkait Covid-19 (Azizah, 2021). Pemerintah Tiongkok juga menyebutkan bahwa provokasi Trump dengan mengatakan bahwa AS ingin memulai perang dingin baru dengan Tiongkok, salah satu pejabat Tiongkok, Zhao Lijian, dalam akun twitter resminya mengatakan bahwa virus kemungkinan

berasal dari militer Amerika Serikat yang dibawa ke Wuhan pada saat mengikuti Pertandingan Militer Dunia pada Oktober 2019, sebelum kasus Covid-19 mencuat. Persaingan kedua negara tersebut semakin memanas. Amerika Serikat memotong kontribusi untuk WHO di bulan April 2020 dan melontarkan wacana penarikan diri dari WHO. Presiden Trump menganggap organisasi tersebut telah berada di bawah kendali Tiongkok, setelah Tiongkok memberi tambahan kontribusi sebesar 30 juta dollar Amerika kepada WHO (Akhli & Samhudi, 2020).

Tingginya tensi persaingan dan aksi saling tuduh mengenai sumber virus Covid-19 telah menyebabkan Tiongkok mendapat sorotan negatif dari komunitas internasional, terutama negara-negara barat. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh *Pew Research Center* pada tahun 2020, mayoritas warga di belasan negara di dunia memandang Tiongkok dengan citra yang buruk karena dianggap gagal menangani penyebaran pandemi Covid-19. Pandangan negatif tentang Tiongkok meningkat dalam beberapa tahun terakhir di banyak negara, diantaranya adalah persepsi terhadap Tiongkok paling buruk terjadi di Australia dengan presentase sebesar 81%, angka tersebut naik 24 poin dari tahun sebelumnya. Kemudian, di Inggris presentase persepsi negatif terhadap Tiongkok sebesar 74% naik 19 poin dan di AS naik 13 poin dari tahun sebelumnya menjadi 73%. Survei ini dilakukan di 14 negara dengan 9 dari negara yang disurvei memiliki pandangan negatif terhadap Tiongkok mencapai level tertinggi dalam 12 tahun terakhir (Pramana , 2020).

Isu kesehatan sendiri telah menjadi salah satu poin prioritas dalam kebijakan luar negeri Tiongkok, bahkan sebelum kemunculan pandemi Covid-19. Pada awal tahun 2015, otoritas kesehatan Tiongkok telah menerbitkan dokumen kebijakan komprehensif untuk kerja sama kesehatan internasional yang menjadi dasar dari konsep *Health Silk Road* (HSR) Tiongkok. Dokumen ini dimulai dengan menggarisbawahi pentingnya kesehatan dalam *Belt and Road Initiative* (BRI). Perbaikan infrastruktur kesehatan akan berdampak pada kemajuan pembangunan sosial dan ekonomi. Namun, seiring arus lintas batas manusia meningkat dengan kemajuan BRI, resiko penyebaran penyakit menular juga ikut meningkat. Memperkuat kerja sama kesehatan antara Tiongkok dengan negara-negara BRI dalam menghadapi krisis kesehatan masyarakat, dianggap akan membantu melindungi keamanan dan stabilitas sosial Tiongkok di negara-negara BRI.

Pada kondisi pandemi Covid-19 ini, Tiongkok berupaya untuk memposisikan dirinya sebagai pemimpin kesehatan global yang bertanggung jawab dengan melakukan diplomasi kesehatan melalui kerangka HSRnya, setelah sebaran virus di negaranya pada Maret 2020 menunjukkan tren penurunan. Diplomasi kesehatan tersebut dilakukan di banyak negara, terutama di Afrika, Asia Tenggara dan Eropa Timur dengan memberi bantuan medis. Disebutkan bahwa Tiongkok memproduksi hampir 50 persen produk peralatan pelindung untuk pasar dunia pra-Covid

19, sehingga kemampuan Tiongkok untuk membuat dan mengekspor pasokan ini amatlah penting bagi negara lain. (Akhli & Samhudi, 2020)

Diplomasi kesehatan yang dilakukan Tiongkok ialah diantaranya memberikan bantuan medis ke negara-negara Afrika. Tiongkok telah mengirimkan 5,4 juta masker dan lebih dari satu juta alat tes dan ribuan pakaian pelindung ke negara-negara Afrika pada awal Maret 2020. Tiongkok juga mengirimkan tim medis ke beberapa negara Afrika seperti Aljazair, Nigeria, Zimbabwe, Republik Demokratik Kongo, Ethiopia, Burkina Faso, Sudan, Djibouti, dan Pantai Gading untuk memerangi pandemi Covid-19. Selain itu, para ahli medis dari lebih 30 negara di Afrika telah melakukan webinar dengan mitra dari Tiongkok tentang cara menangani wabah virus Covid-19 secara efisien di benua tersebut, tak hanya itu diplomasi kesehatan Tiongkok juga dilakukan di beberapa negara Asia Selatan dengan mengirim alat pelindung diri (APD), masker, dan perlengkapan medis lainnya, mengirim lebih dari 400.000 masker serta mengirim ahli medis ke Iran, serta ke beberapa negara Eropa. (Gauttam , Singh, & Jaspal, 2020).

Selain itu, Asia Tenggara juga menjadi salah satu perhatian penting Tiongkok dalam melakukan diplomasi kesehatan globalnya. Para pakar medis Tiongkok telah mengunjungi banyak negara ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos dan Myanmar. Sebagai sebuah bentuk solidaritas dalam memerangi pandemi Covid-19,

pengetahuan dan keahlian medis juga dibagikan ke negara-negara ASEAN melalui konferensi video (Gauttam , Singh, & Jaspal, 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara, yang memiliki hubungan baik dengan Tiongkok. Berdasarkan data *Worldometers* 17 januari 2021 kasus Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 907.929 dengan penambahan kasus sebanyak 11.287 yang menyebabkan Indonesia berada di peringkat 19 negara dengan kasus covid terbanyak di dunia. Sementara di Asia Tenggara, Indonesia bahkan menjadi nomor satu dengan catatan kasus covid terbanyak (Nurdiana, 2021).

Hubungan kedua negara yaitu Tiongkok dan Indonesia telah terjalin sejak lama dan memiliki akar sejarah yang panjang. Tipe hubungan keduanya selalu dinamis sesuai dengan konteks sejarah pada saat itu, hubungan keduanya terlihat semakin erat di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, hal ini dibuktikan dengan beragam kerja sama yang terjalin di bidang investasi, perdagangan dan pariwisata (Sudjatmiko, 2012). Indonesia dan Tiongkok merupakan negara besar di antara negara-negara Asia dari segi wilayah dan penduduk, sehingga tentu hubungan yang terjalin diantara keduanya memberikan keuntungan. Tak terkecuali, adanya pandemi Covid-19 yang menyebar ke banyak negara termasuk Indonesia telah menyebabkan hubungan keduanya semakin erat, bahkan telah mengarah pada kerjasama di bidang kesehatan yaitu pemberian bantuan penanganan Covid-19 Tiongkok untuk Indonesia (Kalebos, Mamentu, & Tulung, 2015).

Kedua negara ini melakukan upaya bersama dan saling memberikan dukungan yang menjadi bukti persahabatan solidaritas mendalam, berdasarkan informasi dari media berita elektronik pada bulan Juni 2020, Indonesia menerima bantuan kesehatan melalui diplomasi kesehatan Tiongkok berupa 100.000 alat tes *polymerase chain reaction* (PCR), 70.000 buah baju alat pelindung diri (APD), 70.000 masker N95 dan 1,3 juta masker bedah. Disebutkan bahwa bantuan kesehatan Tiongkok kepada Indonesia telah dilakukan sejak Maret 2020 (Purnamasari, 2020).

Bantuan kesehatan Tiongkok untuk Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 juga direalisasikan melalui kerjasama produksi vaksin Covid-19 yaitu penandatanganan 2 perjanjian kerjasama antara Bio Farma dan Sinovac untuk penyediaan 50 juta dosis bagi Indonesia mulai November 2020 hingga Maret 2021 dan prioritas penyediaan vaksin oleh Sinovac bagi Bio Farma periode April-Desember 2021. Kerjasama dalam jumlah besar baik berupa bantuan medis maupun produksi vaksin tentunya berdampak pada hubungan kedua negara secara politik yang dipandang semakin dekat (Setiawan, 2020).

Dengan melihat kemampuan Tiongkok dalam memanfaatkan program HSR miliknya di masa pandemi Covid-19 melalui pemberian bantuan medis ke berbagai negara termasuk Indonesia, tentunya hal tersebut memiliki tujuan dan maksud dibaliknyanya, sebagaimana negara bertindak sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Sehingga, penulis tertarik meneliti

dengan judul: *“Diplomasi Kesehatan Tiongkok melalui Bantuan Pandemi Covid-19 di Indonesia”*.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Tiongkok adalah negara yang dianggap mengalami kebangkitan luar biasa di abad ke-21. Tiongkok telah menjadi salah satu kekuatan terkuat dalam perekonomian dunia. Namun kemunculan pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya pergeseran tatanan global. Dalam penelitian yang berjudul *Kontestasi Negara di Tengah Pandemi Covid-19*, Sukma Sushanti (2020) menjelaskan bahwa isu kesehatan menjadi salah satu hal yang tidak terhindarkan dari permainan kepentingan negara terutama di masa pandemi Covid-19 ini. Kebijakan luar negeri negara mulai menggunakan isu kesehatan sebagai salah satu agenda politik di arena internasional dan sering kali menciptakan persaingan antar negara.

Lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul *Kepentingan Politik Donald Trump & Xi Jinping dalam Meningkatkan Relasi Konflikual antara AS-Tiongkok di Masa Pandemi Covid-19*, Rangga Amalul Akhli menjelaskan bahwa persaingan antara AS-Tiongkok memasuki babak baru pada masa penyebaran pandemi Covid-19, kedua negara besar ini bahkan terlibat adu propaganda mengenai asal-usul virus. Hubungan keduanya sedang mengalami kompetisi yang dilingkupi kecurigaan dan persaingan (Akhli & Samhudi, 2020). Di tengah persaingan geopolitik global diantara keduanya pada masa pandemi Covid-19, kemunculan Tiongkok sebagai negara yang sangat aktif memberikan bantuan ke banyak negara melalui

diplomasi dengan memanfaatkan program HSRnya yang telah terbentuk sejak tahun 2015, jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda dunia, menarik perhatian penulis. Hal ini yang kemudian menjadikan penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini akan lebih fokus ke negara Tiongkok yang banyak memberikan bantuan melalui kerangka HSR untuk mengetahui kepentingan dibalikinya.

Adapun waktu penelitian ini adalah Februari 2020 – Desember 2021 dimana Indonesia melaporkan 2 kasus infeksi Covid-19 pertamakali pada 2 Februari 2020 hingga saat ini (Djalante, Lassa, & Setiamarga, 2020). Indonesia menempati posisi pertama dengan catatan kasus Covid-19 terbanyak di Asia Tenggara yaitu dengan tambahan 5.662 kasus baru dan kematian sebanyak 174 kasus pada 31 Mei 2021 dengan jumlah total sebanyak 1.821.703 kasus dan kematian sebanyak 50.578 kasus (Shira, Dezan & Associates, 2021). Pemilihan rentang waktu penelitian ini di latar belakang oleh peningkatan tren kasus Covid-19 di Indonesia yang memuncak pada periode tahun 2020 hingga tahun 2021, Kasus Covid-19 tertinggi selama periode tersebut terjadi pada bulan Juli 2021 yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan kasus aktif corona tertinggi di Asia berada di atas Iran dan India.

Berdasarkan uraian masalah dan batasan penelitian diatas, maka dibuat pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kepentingan Tiongkok melalui diplomasi kesehatan dalam pemberian bantuan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia?

2. Bagaimana strategi diplomasi kesehatan yang dilakukan Tiongkok dalam pemberian bantuan penanganan Covid-19 di Indonesia?
3. Bagaimana tantangan diplomasi kesehatan Tiongkok dalam pemberian bantuan penanganan Covid-19 di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan kepentingan Tiongkok melalui diplomasi kesehatan dalam pemberian bantuan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan strategi diplomasi kesehatan yang dilakukan oleh Tiongkok dalam pemberian bantuan penanganan Covid-19 di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan apa yang menjadi tantangan pelaksanaan diplomasi Kesehatan Tiongkok dengan pemberian bantuan penanganan Covid-19 di Indonesia

### **2. Manfaat Penelitian**

Apabila tujuan penelitian diatas dapat tercapai, maka penelitian ini diharapkan:

- a. Penelitian ini secara akademik diharapkan dapat menemukan kepentingan Tiongkok dalam memberikan bantuan penanganan Covid- 19 di Indonesia melalui pendekatan diplomasi kesehatan. Disamping itu, hasil penelitian ini akan menjadi landasan dan pembanding bagi peneliti yang berminat dalam mengkaji

kepentingan nasional negara melalui pemberian bantuan luar negeri. Disamping itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan literatur untuk kajian yang lebih komprehensif secara akademik.

- b. Secara pragmatis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi kepada semua pihak khususnya para pengambil kebijakan terutama bagi pemerintah Indonesia terkait pencapaian kepentingan nasional melalui pemberian bantuan luar negeri. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pencapaian kepentingan nasional negara.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan yang paling mendasar serta menjadi faktor yang paling menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional sering disebut sebagai tujuan dan ambisi suatu negara baik di bidang ekonomi, militer maupun budaya. Konsep kepentingan nasional dianggap dasar bagi negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain (Bainus & Rachman, 2018).

Kepentingan nasional menurut Hans. J Morgenthau:

*“The meaning of national interest is survival the protection of physical, political and cultural identity against encroachments by other nation states”.* ( Suwarman, et al., 2018)

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional (*national interest*) merupakan pilar utama bagi teorinya tentang politik luar negeri dan politik internasional yang realis. Pemikiran Morgenthau didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi suatu negara harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal, dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menyatakan bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama (Mas'ood, 1990).

Dalam mencapai kepentingan nasional negara, isu kesehatan global juga telah menjadi perhatian para pembuat kebijakan luar negeri, terutama dengan adanya globalisasi yang menyebabkan kesehatan global menjadi lebih relevan di berbagai aspek kebijakan luar negeri dibanding sebelumnya. Diplomasi diartikan sebagai seni dan praktik dalam hubungan internasional dan menjadi salah satu instrument yang digunakan oleh actor internasional untuk mengimplementasikan kebijakan luar negeri mereka. Diplomasi secara tradisional berfokus pada dialog dan negosiasi aliansi dan perjanjian. Namun penggunaan istilah 'diplomasi kesehatan' mencakup tidak hanya perjanjian internasional tentang kesehatan namun juga upaya untuk mempromosikan peran kesehatan global dalam kebijakan luar negeri, serta penggunaan intervensi kesehatan untuk mendukung tujuan kebijakan luar negeri (Feldbaum, Lee, & Michaud, 2010).

Menurut Kichbush, diplomasi kesehatan merupakan bagian dari proses negosiasi multilevel dan multi actor yang membentuk sebuah kebijakan dengan menggunakan pendekatan kesehatan untuk mencapai tujuan politik, social, dan ekonomi (Mahani, Ruckert, & Labonte, 2018). Menurut Organisasi Kesehatan Pan Amerika (PAHO) munculnya diplomasi kesehatan dipengaruhi oleh semakin banyaknya tantangan kesehatan yang kini melampaui batas-batas negara yang menghasilkan tuntutan untuk merespon kebijakan yang lebih terpadu serta koordinasi diplomatic di tingkat global dan dunia yang semakin terglobalisasi saat ini. Meningkatnya arus lintas batas manusia, produk, layanan dan modal telah menyebabkan penyebaran penyakit serta wabah pandemic lebih besar dari sebelumnya (PAHO, 2017).

Dalam penelitian yang berjudul *Negotiating Access to HIV/AIDS Medicines: A Study of the Strategies Adopted by Brazil* oleh Anand Balachandra and Mariya Kravkova, Jeswald W.Salacuse membagi diplomasi kesehatan dalam tiga strategi pendekatan yaitu *dependence, autonomy, and using the international community*. *Dependence* yang dimaksud yaitu mencari dukungan dari negara lain melalui hubungan bilateral. *Autonomy* yang dimaksud yaitu menggunakan kekuatan negosiasi secara otonom dengan mengembangkan perjanjian yang telah dinegosiasikan, sedangkan *using the international community* adalah memanfaatkan kekuatan masyarakat untuk mencapai tujuannya dengan

berpartisipasi dalam organisasi internasional (Fairman, Chigas, McClintock, & Drager, 2012)

Tindakan Tiongkok sebagai negara yang sangat aktif melakukan diplomasi kesehatan melalui pemberian bantuan luar negeri penanganan Covid-19 ke berbagai negara terutama Indonesia dipandang sebagai tindakan yang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Dalam hal ini, Tiongkok menjadikan bantuan luar negeri sebagai instrument kerja sama sebagai mana yang dimaksud Morgenthau dalam mencapai kepentingan nasional.

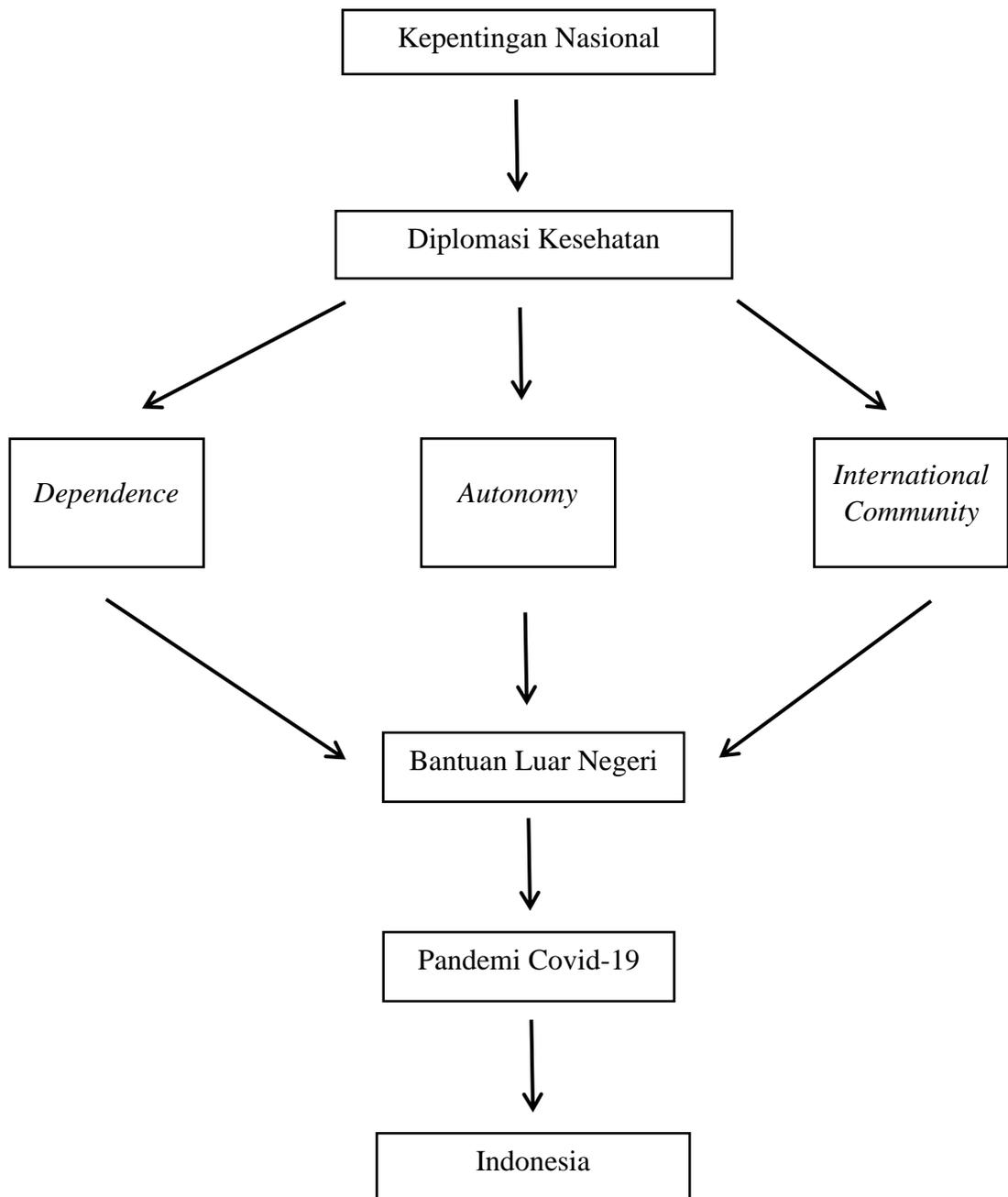
Bantuan luar negeri dan kerja sama internasional merupakan salah satu instrument dalam kebijakan luar negeri yang telah lazim digunakan dalam praktek hubungan antar negara. Bantuan luar negeri sering digunakan sebagai strategi atau pendekatan yang dipilih oleh suatu negara untuk mencapai kepentingannya. Istilah bantuan luar negeri (*foreign aid*) dapat diartikan sebagai tindakan-tindakan negara, masyarakat (penduduk), atau lembaga-lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga lainn ya yang berada pada suatu negara tertentu ataupun pasar tertentu di luar negeri, memberikan bantuan berupa pinjaman, memberi hibah atau penanaman modal mereka kepada pihak tertentu di negara lain. Dalam prakteknya, bantuan luar negeri merupakan jalinan konsep yang berhubungan dengan mengalirnya modal atau nilai kebendaan atau jasa-jasa kepada pihak lain di luar negeri dengan tujuan untuk membantu atau dalam rangka kerja sama satu sama lain untuk tujuan tertentu (Ikbar, 2007).

Dalam memberikan bantuan luar negeri, tentunya suatu negara memiliki motivasi yang beragam, dan tidak dapat dipungkiri bahwa negara yang memberikan bantuan luar negeri kepada negara lain memiliki kepentingan tertentu. Alasan pemberian bantuan oleh suatu negara atau institusi tertentu dapat berupa *self-interest* politik, ataupun strategi ekonomi, sekali pun pada umumnya alasan itu berupa motivasi moral atau bantuan kemanusiaan atau bantuan untuk kesinambungan proses hubungan komplementasi dan pembangunan pihak lain. Namun demikian, sulit ditemukan bukti-bukti sejarah perkembangan bantuan luar negeri selama periode tertentu yang menunjukkan bahwa negara donor atau lembaga-lembaga kredit internasional membantu tanpa mengharapkan keuntungan tertentu (Ikbar , 2007 ).

Kerja sama internasional juga dapat menjadi salah satu instrument yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan nasional dalam hubungan antar negara. Kerja sama internasional bersifat *win-win solution* yaitu memecahkan masalah politik internasional dengan saling menguntungkan melalui perjanjian internasional Ketiga konsep yang penulis gunakan tersebut, menunjukkan keterkaitan satu sama lain. Lebih lanjut, konsep mengenai kepentingan nasional merujuk pada tujuan, cita-cita, dan ambisi negara yang mendasari untuk melakukan hubungan dengan negara lain, salah satunya dengan melakukan diplomasi kesehatan atau dengan kata lain, alasan pembenaran utama bagi tindakan suatu negara termasuk melakukan diplomasi adalah kepentingan nasional dan konsep bantuan luar negeri dan

kerja sama internasional digunakan sebagai instrument untuk mewujudkannya.

**Bagan 1.1** Kerangka Konseptual Penelitian



( Sumber: Diolah dari berbagai literature)

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang maksud atau kepentingan Tiongkok, tantangan, dan strategi yang dilakukan terkait diplomasi kesehatan yang dilakukan dengan memberikan bantuan penanganan Covid-19 di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode deskriptif. Penelitian dengan metode deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan fenomena yang terjadi sesuai dengan permasalahan yang diambil.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik pengumpulan data berbasis telaah pustaka / literatur (*library research*). Data yang diperoleh dengan memahami dan mempelajari sejumlah literatur baik berupa buku-buku, artikel, jurnal, penelitian terdahulu, dokumen, berita dari media cetak maupun elektronik yang dapat dipertanggung jawabkan serta karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

### **3. Jenis Data**

Penelitian ini banyak menggunakan data informasi terkait negara Tiongkok dan Indonesia, terutama kebijakan luar negeri Tiongkok yang berkaitan dengan pemberian bantuan ke berbagai negara di masa pandemi Covid-19 khususnya ke Indonesia. Data tersebut diperoleh dari

buku, jurnal, artikel, dokumen, serta sumber berita yang dapat dipertanggung jawabkan. Untuk itu, jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari pengumpulan data yang penulis lakukan selama penelitian.

#### **4. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif, yakni menjelaskan dan menganalisis data yang berhasil penulis temukan. Kemudian penulis berusaha menyajikan hasil dari penelitian tersebut melalui penggambaran fakta-fakta yang ada dan kemudian menghubungkan fakta tersebut dengan fakta lainnya sehingga menghasilkan argument yang tepat.

#### **5. Metode Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penulisan deduktif, metode deduktif digunakan penulis untuk menggambarkan secara umum masalah yang diteliti, kemudian menarik kesimpulan yang lebih spesifik dan khusus dalam menganalisis data. Penulis akan memaparkan secara umum hubungan antara negara Tiongkok dan Indonesia dan kebijakan luar negeri dari kedua negara tersebut, kasus Covid-19 di Indonesia serta bantuan yang diberikan Tiongkok kepada Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19. Penulis kemudian akan memaparkan kepentingan, strategi, serta tantangan dibalik diplomasi kesehatan melalui bantuan yang diberikan Tiongkok dalam penanganan Covid-19 di Indonesia

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, penulis menjelaskan terkait literature konsep yang penulis gunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab penelitian ini. Konsep yang digunakan yaitu konsep kepentingan nasional, konsep diplomasi kesehatan, dan konsep bantuan luar negeri dan kerja sama internasional. Penjelasan di bab II ini akan lebih luas dibanding dengan penjelasan kerangka konseptual yang telah ada pada bab I. Konsep tersebut akan dijelaskan lebih luas setelah dilakukan tinjauan pustaka pada buku maupun jurnal.

#### **A. Kepentingan Nasional**

Konsep kepentingan nasional telah menjadi bagian penting dalam ilmu hubungan internasional untuk waktu yang sangat lama (bahkan sejak pertama kali studi HI terbentuk). Kepentingan nasional merupakan perangkat eksplanatori kunci (*key explanatory tool*) dalam memahami hubungan internasional, khususnya dalam menganalisis diplomasi dan kebijakan luar negeri. Hampir tidak ada analisis tentang politik luar negeri dan diplomasi suatu negara yang tidak menyinggung tentang faktor kepentingan nasional. Menurut Theodore Coulombis dan James Wolfe, kepentingan nasional masih menjadi konsep yang sangat penting dalam setiap upaya mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksikan atau membuat preskripsi tentang perilaku negara dalam lingkup interaksi internasional (Bakry, 2017).

Menurut Scott Burchill, kepentingan nasional merupakan motivasi dari negara dalam menjalankan kebijakan eksternal (hubungan luar negeri). Adapun menurut Charles Bread, kepentingan nasional adalah alasan negara (*raison d'état*) di belakang tujuan-tujuan dan ambisi-ambisinya menjalankan hubungan internasional. Pada intinya, banyak ilmuwan menggunakan gagasan atau konsep kepentingan nasional untuk menggambarkan alasan (*reasoning*), motivasi, atau justifikasi utama yang mendasari perilaku suatu negara dalam lingkungan global (Bakry, 2017) . Lebih dalam, William Nester menyatakan bahwa kepentingan nasional adalah tujuan-tujuan (goals) yang ingin dicapai oleh semua negara, yakni kemerdekaan politik, pertumbuhan ekonomi, kelestarian budaya dan perdamaian serta tujuan-tujuan khusus yang ingin dicapai negara atas masalah-masalah (isu) tertentu (Ambarwati & Wijatmadja, 2016) .

Dalam kerangka realisme, kepentingan nasional mengacu pada nilai-nilai jangka panjang suatu negara dan dapat diidentifikasi melalui sejarah negara tersebut, kepentingan suatu negara tidak berubah meskipun sarana untuk mencapai kepentingan tersebut bisa saja berubah (Neack, 2014). Sebagai seorang pakar yang dikenal dengan sebutan pelopor realisme dalam studi Hubungan Internasional (HI), Hans Morgenthau menyamakan kepentingan nasional dengan *power*. Pemikiran Morgenthau ini didasarkan pada premis bahwa strategi diplomasi harus didasarkan pada kepentingan nasional, bukan pada alasan-alasan moral, legal dan ideologi yang dianggapnya utopis dan bahkan berbahaya. Ia menegaskan bahwa kepentingan nasional setiap negara dalam hubungan internasional adalah mengejar *power*. Morgenthau sendiri

mendefinisikan *power* sebagai apa saja yang menjadikan dan mempertahankan kendali suatu negara terhadap negara lain (Bakry, 2017).

Morgenthau mengklasifikasikan kepentingan nasional kedalam dua tingkatan, yaitu kepentingan nasional primer dan kepentingan nasional sekunder. Kedua tingkatan kepentingan ini dianggap sebagai hal yang mempengaruhi tindakan serta kebijakan yang akan dirumuskan oleh negara. Kepentingan nasional primer atau disebut juga sebagai kepentingan vital, memiliki peranan penting terutama bagi keberlangsungan negara, kepentingan nasional primer ini menyangkut perlindungan terhadap identitas fisik, kedaulatan politik, serta keamanan suatu negara. Kepentingan ini dikategorikan sebagai kepentingan dengan prioritas tertinggi, tidak ada kompromi dalam mewujudkan kepentingan primer ini, dan negara tidak akan segan berperang untuk hal tersebut.

Sedangkan, kepentingan nasional sekunder merupakan kepentingan yang sifatnya lebih fleksibel dan dinamis, tergantung pada kondisi ekonomi dan politik internasional pada saat itu. Meskipun bukan kepentingan vital, kepentingan sekunder ini tetap penting dalam perumusan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan perdagangan, pengaruh politik regional, dan bantuan luar negeri termasuk ke dalam kepentingan nasional sekunder. Dalam merumuskan kepentingan nasional sekunder ini, negara biasanya akan mempertimbangkan keuntungan jangka panjang, stabilitas regional, dan hubungan diplomatik yang baik dengan negara lain (Bakry, 2017).

Menurut Morgenthau, kepentingan nasional sangat erat kaitannya dengan *power & trust*. Jika dikaitkan dengan *power* dalam konteks ini, setiap negara memiliki kekuatan untuk mempengaruhi negara lain, sehingga dapat mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai kepentingan nasional, negara perlu mendapat pengakuan dari masyarakat internasional dengan membentuk *trust*, salah satunya dengan berpartisipasi di berbagai isu-isu internasional, partisipasi tersebut dapat berupa praktik diplomasi. Dalam konteks isu kesehatan global, kepentingan nasional dapat dijelaskan sebagai upaya untuk mempromosikan dan melindungi kesehatan masyarakat di negaranya dengan mempertahankan stabilitas internal dan berusaha untuk memperkuat posisi negaranya dalam ranah internasional. Dalam hal ini, negara juga dapat menggunakan isu kesehatan sebagai sarana untuk menjalankan kebijakan yang didasarkan pada kepentingan nasional seperti dengan meningkatkan keamanan, citra internasional, atau mendukung tujuan kepentingan kebijakan luar negeri lainnya yang tidak berkaitan dengan kesehatan.

Sejalan dengan pemikiran Morgenthau, Donald E. Nuechterlein mendefinisikan kepentingan nasional sebagai tindakan suatu negara terhadap negara lain dipengaruhi oleh banyak faktor. Nuechterlein menyebutkan bahwa secara internal kepentingan nasional merupakan manifestasi dari kebutuhan dan keinginan sebuah negara yang ingin dicapai di lingkungan eksternal negara. Lebih lanjut Nuechterlein membagi kepentingan nasional ke dalam empat point berdasarkan kebutuhan dasar sebuah negara sebagai berikut:

1. *Defence Interests*, merupakan kepentingan dalam bidang pertahanan, yaitu dengan memberikan perlindungan terhadap negara dan warga negaranya dari ancaman kekerasan fisik yang berasal dari negara lain dan juga ancaman eksternal terhadap system pemerintahan.
2. *Economic Interests*, merupakan kepentingan dalam bidang ekonomi, yaitu dengan menjalin hubungan baik dengan negara lain untuk tujuan peningkatan ekonomi negaranya.
3. *World Order Interests*, merupakan kepentingan yang bertujuan untuk memelihara dan menjaga kestabilan politik dan ekonomi internasional untuk keuntungan negaranya.
4. *Ideological Interests*, merupakan kepentingan yang berkaitan dengan ideologi yaitu dengan melindungi ideologi negaranya dari ancaman ideologi negara lain (Nuechterlein, 1976).

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisa kepentingan nasional Tiongkok menggunakan teori yang dikemukakan oleh Donald E. Nuechterlein. Berdasarkan definisi kepentingan nasional menurut Nuechterlein, Tiongkok sebagai sebuah negara menjalankan kepentingan nasionalnya di era pandemi Covid-19 dengan memberikan bantuan penanganan kepada Indonesia yang ditujukan untuk mencapai *World Order Interests*. Tiongkok memiliki kepentingan untuk menjaga posisi negaranya dalam dunia internasional terlebih setelah merebaknya pandemi Covid-19 serta tuduhan yang diterima negara Tiongkok sebagai sumber pandemi. Tiongkok juga memiliki kepentingan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan negara yang terlibat dalam proyek besar

BRI nya diantaranya adalah Indonesia agar kepentingan nasionalnya itu *Chinese Dream* yang ingin dicapai Tiongkok tetap berjalan meskipun pandemi Covid-19 masih berlangsung. Untuk itu, kepentingan nasional Tiongkok terhadap Indonesia dilaksanakan melalui upaya diplomasi kesehatan berupa pengiriman bantuan medis untuk Indonesia, pertemuan yang membahas mengenai penanganan dan pencegahan pandemi Covid-19, serta melaksanakan dialog terkait perjanjian kerja sama antar kedua negara di bidang kesehatan.

Disamping kepentingan nasional sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula kepentingan nasional yang sulit untuk diukur, status dan prestise misalnya. Status dan prestise adalah jenis kepentingan yang ukurannya tidak jelas. Keinginan suatu negara agar dunia mengetahui kemajuan teknologi, militer, social, politik, budaya dan lain-lain masuk dalam kategori ini. Dengan merujuk pada kepentingan nasional, para pemimpin nasional (presiden, perdana menteri, raja) berusaha untuk memaksimalkan keuntungan negaranya dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Jika perlu, keuntungan yang bakal diraih tersebut diatas penderitaan bangsa lain, yang terpenting adalah kepentingan nasionalnya bisa terpenuhi (Ambarwati & Wijatmadja, 2016 ).

## **B. Diplomasi Kesehatan**

Isu kesehatan telah menjadi perhatian penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara dewasa ini, terlebih isu kesehatan memiliki dampak yang luas baik dari segi keamanan, kesejahteraan bahkan ekonomi. Laju globalisasi yang semakin cepat telah menyebabkan batas-batas negara menjadi semakin buram,

akibatnya masalah kesehatan suatu negara tidak hanya dapat mempengaruhi kondisi internal negaranya, melainkan juga dapat mempengaruhi negara-negara tetangga, bahkan seluruh dunia. Wabah SARS di tahun 2003 lalu diikuti dengan pandemic influenza A H1N1 pada tahun 2009 menunjukkan seberapa cepat wabah muncul, menyebar, merenggut nyawa, serta membatasi perjalanan dan perdagangan (Katz, Kornblet, Arnold, Lief, & Fischer, 2011). Kickbusch dan Lister mendefinisikan diplomasi kesehatan sebagai suatu diplomasi yang mengacu pada masalah kesehatan yang melampaui batas-batas nasional negara serta melibatkan bantuan luar negeri baik secara bilateral dan bantuan kemanusiaan antar negara (Chattu, 2017).

Diplomasi didefinisikan sebagai bidang studi dan praktik yang melibatkan banyak proses negosiasi. Diplomasi dilakukan antara berbagai kelompok untuk mencapai kepentingan bersama tanpa konflik. Secara konvensional, diplomasi hanya melibatkan diplomat yang profesional dan terlatih dari kementerian luar negeri untuk merundingkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi, perdagangan, keamanan nasional. Namun dengan meningkatnya kompleksitas situasi dewasa ini, diplomasi dilakukan secara luas oleh berbagai aktor seperti penasehat negara, pejabat kementerian dalam negeri, organisasi internasional, bahkan organisasi non-pemerintah (Chattu, 2017).

Pada akhir masa perang dingin, agenda internasional berubah secara signifikan yang juga ikut mengubah karakter diplomasi. Perubahan dalam diplomasi pasca perang dingin terutama terlihat dengan banyaknya keterlibatan aktor baru di bidang kerja sama internasional, sistem internasional yang

berkembang pesat membuka pintu bagi banyak aktor baru termasuk organisasi internasional, perusahaan transnasional, dan kelompok kepentingan. Diplomasi yang sejak pertengahan abad ke-15 dikenal sebagai alat penting dari kebijakan luar negeri menjadi lebih luas di era pasca perang dingin, selain muncul banyak aktor baru, diplomasi dewasa ini juga telah berkembang ke berbagai aspek yang meliputi berbagai isu, tidak hanya berfokus pada isu keamanan, ekonomi, dan politik saja akan tetapi juga isu-isu seperti lingkungan, social budaya, kemanusiaan hingga kesehatan (Klavins, 2011). Peter Bourne penasehat khusus Jimmy Carter untuk urusan kesehatan memperkenalkan diplomasi kesehatan untuk pertama kalinya pada tahun 1978. Menurut Bourne, masalah kemanusiaan seperti kesehatan dapat menjadi sarana penting untuk memperbaiki hubungan dan membangun hubungan diplomatik yang kuat, kesehatan dianggap sebagai salah satu faktor penting dalam kebijakan luar negeri suatu negara (Zarnaq, Alizadeh, & Kabiri, 2019).

Diplomasi kesehatan diartikan proses negosiasi multi-level dan multi-aktor yang membentuk dan mengelola lingkungan kebijakan global untuk tujuan kesehatan. Menurut Feldbaum dan Michaud, diplomasi kesehatan adalah hal yang menjelaskan proses dari negosiasi terkait kesehatan, yang menjelaskan dampak kesehatan dari negosiasi non-kesehatan, serta menjadi arah bagi kebijakan luar negeri suatu negara dalam rangka mendukung kesehatan global (Feldbaum & Michaud, 2010).

Diplomasi kesehatan secara global dianggap sebagai wujud dari semakin penting dan luasnya isu-isu diplomasi, diplomasi kesehatan juga membantu

suatu negara untuk membangun citranya melalui program bantuan kesehatan. Oleh karena itu, diplomasi kesehatan digolongkan dalam ranah *soft power* yang berperan penting dalam memperkuat hegemoni suatu bangsa terhadap negara lain. Inti dari diplomasi kesehatan mencakup masalah kesehatan yang melampaui batas-batas nasional yang memerlukan perjanjian, instrument, dan aliansi global dalam hal penanganan agar dapat ditangani dengan sukses dan berkelanjutan melalui aksi bersama. Sebagaimana yang Lee dan Smith kemukakan bahwa masalah kesehatan membutuhkan tindakan kolektif seluruh dunia agar penanganannya bisa menjadi lebih efektif (Lee & Smith, 2011). Labonte dan Gagnon menjelaskan bahwa diplomasi kesehatan dalam kaitannya dengan teori hubungan internasional pada dasarnya adalah hubungan antara kesehatan dan kebijakan luar negeri yang mengacu pada kepentingan nasional suatu negara. Negara-negara maju dan organisasi internasional akan cenderung melaksanakan diplomasi kesehatan melalui pemberian bantuan medis selama keadaan darurat. Sehingga, diplomasi kesehatan menjadi alat penting untuk meningkatkan hubungan bilateral ataupun multilateral. Untuk itu, tidak menutup kemungkinan adanya proses negosiasi bilateral di dalamnya, baik antara lembaga dan negara misalnya antara bank dunia dengan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah maupun antara satu negara dengan negara lainnya (Kickbusch, Nikogosian, Kazatchkine, & Kökény, 2021).

Menurut Jeswald W. Salacuse (1999) terdapat tiga konsep strategi yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan diplomasi dengan negara lain yaitu:

- a. *Dependence*, dalam konteks diplomasi, strategi *dependence* didefinisikan sebagai tindakan mencari dukungan dari negara lain. Strategi ini sering disebut sebagai diplomasi bilateral, sebuah negara akan memanfaatkan atau mengelola hubungannya dengan negara lain untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.
- b. *Autonomy*, merupakan strategi diplomasi dimana suatu negara melakukan diplomasi ke negara lain dengan mengontrol kemandirian negaranya dan tidak mengorbankan kepentingan intinya dalam upaya mencapai kesepakatan, strategi *autonomy* biasanya dilakukan dalam bentuk unilateral. Dalam pelaksanaan diplomasi dengan strategi ini, negara akan menggunakan kekuatan negosiasinya secara otonom untuk mencapai kepentingan nasionalnya.
- c. *International Community*, merupakan strategi diplomasi yang melibatkan organisasi internasional dan memanfaatkan *power* organisasi tersebut untuk mencapai tujuan, strategi diplomasi ini dilakukan dalam bentuk multilateral (Salacuse, 1999).

Konsep mengenai diplomasi kesehatan tidak hanya dilihat sebatas pada tujuan untuk mencapai dan meningkatkan kesehatan global, Fauci dalam jurnal *What is 'Global Health Diplomacy'? A Conceptual Review* mendefinisikan diplomasi kesehatan sebagai alat untuk menarik hati dan pikiran orang-orang di negara miskin atau terbelakang dengan mengeksport peralatan medis, tenaga ahli dan kebutuhan kesehatan lainnya. Diplomasi kesehatan dianggap sebagai

agen politik yang memiliki tujuan ganda yaitu untuk meningkatkan kesehatan global sambil membantu mencapai kepentingan nasional.(Chauhan, 2020).

Diplomasi kesehatan Tiongkok di Indonesia dilakukan dengan pemberian bantuan penanganan pandemi Covid-19. Diplomasi kesehatan tersebut sesuai dengan diplomasi kesehatan yang dikemukakan oleh Fauci bahwa diplomasi kesehatan mencakup kegiatan mengekspor peralatan medis, tenaga ahli dan kebutuhan kesehatan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan global sambil membantu mencapai kepentingan nasional negara Tiongkok yang telah dipaparkan pada konsep sebelumnya. Pemberian bantuan penanganan Covid-19 oleh Tiongkok kepada Indonesia mencakup pengiriman alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), masker N95, sarung tangan, penutup sepatu, thermometer inframerah serta *tes kit* dan *swab kit*.

### **C. Bantuan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional**

*The Penguin Dictionary of International Relations* mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai transfer barang-barang dan jasa di antara aktor-aktor internasional dengan syarat-syarat tertentu. Carol Lancaster juga mendefinisikan bantuan luar negeri sebagai perpindahan sumber daya umum secara sukarela dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya, atau ke suatu lembaga non-pemerintah (*Non Governmental Organization*) maupun kepada suatu organisasi internasional. Lancaster menjelaskan bahwa fungsi dari bantuan luar negeri mencakup tujuan yaitu sebagai tanda hubungan diplomatik, untuk meningkatkan kekuatan serta pengaruh negara pengirim di negara penerima, untuk memperluas pengaruh budaya, sebagai bentuk apresiasi atas

perilaku negara penerima yang sesuai dengan kehendak negara pengirim, dan sebagai usaha untuk memperoleh akses ekonomi ke negara penerima. Bantuan luar negeri yang diberikan suatu negara mencakup hibah, hutang, bilateral dan multilateral, dan juga bisa diberikan karena alasan kemanusiaan (Ambarwati & Wijatmadja, 2016 ).

Bantuan luar negeri digunakan sebagai instrument kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Bantuan tersebut mengimplementasikan suatu hubungan antara dua aktor yang ditentukan satu tangan sebagai pihak donor dan pihak lainnya sebagai penerima. Dari pandangan negara donor, ada empat motivasi yang mendasari suatu bantuan luar negeri. Keempat motivasi tersebut adalah: 1) pencapaian keamanan yang lebih besar, 2) memenuhi kewajiban kemanusiaan untuk memberi bantuan pada negara dan bangsa yang kurang beruntung, 3) mencapai tujuan ekonomi yang diwujudkan dengan pembukaan dan pemeliharaan akses ke pasar negara kurang berkembang atas komoditi pilihan atau melalui akses terhadap bahan mentah yang di suplai negara miskin pada negara yang diinginkan, dan 4) tujuan diplomatik yang diperoleh melalui *national prestige and power*. Selain itu, dasar kemanusiaan bagi pemberian bantuan asing juga memainkan peranan yang signifikan bagi setiap bantuan luar negeri, program bantuan ini menekankan pada pinjaman yang sangat lunak, bersifat multilateral khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, kerja sama koperasi dan pengembangan komunitas dan pedesaan (Ambarwati & Wijatmadja, 2016 ).

Lebih dalam, terdapat alasan mengapa suatu negara atau institusi tertentu memberikan bantuan luar negeri yaitu adanya motivasi politik dan motivasi ekonomi. Motivasi politik pemberian bantuan luar negeri mencakup tujuan untuk memperoleh keuntungan politik domestic negara pendonor, sebagai contoh bantuan *Marshall Plan* Amerika Serikat (AS) menjelang akhir tahun 1940-an ditujukan selain untuk membantu pemulihan ekonomi dan pembangunan Eropa Barat, juga merupakan suatu alat atau sarana yang amat mendukung implementasi politik luar negeri dan pertahanan keamanan AS untuk membendung meluasnya kekuatan komunis di Eropa. Bantuan luar negeri diberikan dengan tujuan keutuhan rezim dan negara penerima bantuan dapat mendukung berbagai kebijakan pemerintah AS sebagai negara *super power*. Hal ini menyebabkan adanya keterikatan politis antara negara penerima bantuan dengan negara yang memberikan bantuan, bahkan bantuan yang diberikan oleh negara pendonor dapat memberi peluang keterlibatan mereka dalam pembuatan keputusan atau pelaksanaan kebijakan-kebijakan domestik negara penerima donor. Dengan demikian, bantuan luar negeri dapat saja dipandang sebagai perpanjangan tangan kepentingan negara-negara donor meskipun kadar atau ukurannya tidak menentu (Ikbar, 2007).

Selain motivasi politik, pemberian bantuan luar negeri juga dikarenakan adanya motivasi ekonomi. Motivasi ekonomi adalah pembenaran yang paling rasional negara dalam memberikan bantuan, bantuan luar negeri yang diberikan sebenarnya memainkan peranan yang rasional dalam rangka kepentingan timbal balik ekonomis seperti harapan untuk mendapatkan

berbagai sumber daya dan energi dari negara penerima bantuan. Bantuan luar negeri kebanyakan diberikan dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan di negara yang diberi bantuan, dengan harapan bahwa tingkat daya beli masyarakatnya bisa kian tinggi sehingga mampu membeli produk-produk industri negara donor (pemberi bantuan). Selain itu pemberian bantuan luar negeri tidak hanya berupa modal, tetapi juga tenaga ahli, dan manajemen, serta alih teknologi. Secara ekonomis, bantuan luar negeri yang diberikan negara pendonor memberikan timbal balik yang lebih besar bagi para tenaga asingnya yang bekerja di negara penerima donor, tenaga asing tersebut menjadi bagian dari *capital flight* dari devisa negara, juga memberikan masukan atas pendapatan devisa melalui pajak pendapatan sehingga menyebabkan terjadinya arus balik pendapatan (imbal-balik modal) (Ikbar, 2007).

Menurut K.J. Holsti dalam karyanya "*International Politics: Framework of Analysis*", bantuan luar negeri diartikan sebagai transfer uang, barang, jasa dan teknologi dari negara donor ke negara penerima. Bantuan luar negeri yang diberikan biasanya menguntungkan kedua belah pihak baik negara penerima maupun negara pendonor (Holsti, 1983). Adapun jenis-jenis bantuan luar negeri menurut Morgenthau (1962), terbagi menjadi 6 jenis meliputi:

a. *Humanitarian Foreign Aid*

Dari keenam jenis bantuan luar negeri yang dikemukakan oleh Morgenthau, *humanitarian foreign aid* atau bantuan kemanusiaan merupakan bantuan yang bersifat non-politis. Bantuan ini biasanya diberikan oleh suatu negara ke negara yang menjadi korban bencana alam seperti

banjir, kelaparan, dan wabah penyakit. Meskipun disebut sebagai bantuan yang bersifat non-politis, namun jika dalam pelaksanaannya terdapat campur tangan dari pemerintah, maka pemberian bantuan tersebut bisa saja didasari oleh tujuan politik.

*b. Subsistence Foreign Aid*

Merupakan jenis bantuan yang memiliki kemiripan dengan bantuan kemanusiaan yaitu bantuan yang diberikan untuk tujuan mencegah rusaknya ketertiban dan disintegrasi masyarakat yang terorganisir. Namun dalam pelaksanaan bantuan ini juga menjalankan fungsi politik yaitu memelihara status quo, sehingga jika terdapat rezim politik yang tidak bisa bertahan, *subsistence foreign aid* ditujukan untuk mengurangi peluang terjadinya hal tersebut terwujud.

*c. Military Foreign Aid*

Merupakan jenis bantuan tradisional yang diberikan oleh suatu negara untuk menopang aliansi. Dalam bantuan militer ini, suatu negara memberikan bantuan kepada negara lain yang merupakan aliansinya. Kedua negara pemberi dan penerima bantuan menyatukan sumber daya mereka, yang satu menyediakan uang, material, dan pelatihan, dan yang lainnya menyediakan tenaga kerja.

*d. Bribery*

*Bribery* atau biasa disebut dengan suap, merupakan jenis bantuan yang diberikan oleh suatu negara dengan cara menyuap untuk memperoleh

keuntungan politik, dan hal tersebut dianggap lumrah dalam hubungan antar negara guna mencapai kepentingannya.

e. *Prestige Foreign Aid*

Merupakan jenis bantuan luar negeri yang diberikan oleh suatu negara untuk tujuan mengejar prestise, seperti dengan meningkatkan citra positif di negara-negara lain, ataupun sebagai penegasan diri sebagai aktor yang bertanggung jawab, tujuan-tujuan tersebut biasanya tersembunyi dibalik tujuan-tujuan nyata seperti untuk pembangunan ekonomi dan bantuan militer.

f. *Foreign Aid for Economic Development*

Merupakan jenis bantuan luar negeri yang diberikan oleh suatu negara untuk tujuan pembangunan ekonomi di negara-negara terbelakang. Dalam pemberian jenis bantuan ini, negara penerima bantuan juga biasanya akan mengalami perkembangan politik akibat dari pembangunan ekonomi yang terjadi di negaranya. Pembangunan ekonomi akan sejalan dengan perbaikan kondisi politik negara penerima bantuan.

Di masa pandemi Covid-19 ini, pemberian bantuan kesehatan yang dilakukan oleh Tiongkok kepada Indonesia untuk menangani pandemi dapat dikategorikan sebagai *Humanitarian Foreign Aid* yaitu bantuan kemanusiaan yang biasanya diberikan kepada negara yang menjadi korban bencana alam seperti banjir, kelaparan dan wabah penyakit. Namun, seperti yang dijelaskan oleh Morgenthau meskipun bantuan luar negeri ini dikategorikan sebagai bantuan yang bersifat non-politis, apabila

pelaksanaannya terdapat campur tangan dari pemerintah negara pendonor, maka pemberian bantuan tersebut bisa saja didasari oleh tujuan politik. Dalam hal Tiongkok ini, apabila ditelaah lebih dalam, pemberian bantuan penanganan covid-19 kepada Indonesia tidak semata didasari oleh rasa kemanusiaan melainkan memiliki tujuan lain diantaranya adalah untuk meningkatkan citra positif di negara-negara lain, dan juga sebagai penegasan diri sebagai aktor yang bertanggung jawab.

Tindakan negara dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini juga dapat dilihat dari sudut pandang kerja sama internasional. Menurut K.J Holsti kerja sama awalnya terjadi akibat adanya beragam masalah dalam lingkup nasional, regional maupun global. Sehingga, memerlukan perhatian tidak hanya oleh satu negara, dimana setiap negara masing-masing akan melakukan pendekatan dengan membawa saran atau usul untuk menanggulangi masalah yang sedang dihadapi bersama, melakukan negosiasi, perundingan serta diakhiri dengan perjanjian yang memuaskan semua pihak yang terlibat (Holsti, 1983).

Kerja sama bisa saja dilakukan antar negara, individu maupun organisasi, kerja sama terjadi akibat adanya hubungan saling ketergantungan dan semakin bertambahnya kompleksitas dalam dunia internasional. Kerja sama sering dilakukan untuk menghadapi berbagai isu-isu terkait ekonomi, keamanan, lingkungan bahkan kesehatan. Aktornya pun beragam mulai dari negara, *non governmental organization*, perusahaan maupun individu. Dalam konteks hubungan internasional sendiri, negara

merupakan aktor utama, dimana melakukan sebuah kerja sama dimotivasi oleh kepentingan nasional yang ingin dicapai. Kerja sama internasional sendiri terbagi menjadi tiga bentuk yaitu:

- a. Kerja sama Bilateral, adalah kerja sama yang dibuat dan dilakukan oleh dua negara saja untuk mengatur kepentingan dari kedua belah pihak.
- b. Kerja sama Regional, adalah kerja sama yang dilakukan oleh lebih dari dua negara dalam satu kawasan
- c. Kerja sama Multilateral, adalah kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara di luar batasan dari suatu kawasan tertentu.

Pandemi Covid-19 telah mendorong banyak negara untuk melakukan kerja sama internasional, mengingat bahwa virus ini tidak hanya menyebar di satu negara melainkan menyebar ke banyak negara dengan cepat dan mengakibatkan kematian dalam jumlah besar. Krisis pandemi Covid-19 dianggap membutuhkan kerja sama internasional yang signifikan untuk mengurangi dampaknya (Basrur & Kliem, 2020). Dalam penelitian ini, tindakan yang dilakukan oleh Tiongkok dengan Indonesia dikategorikan sebagai kerja sama bilateral yang ditujukan untuk mencapai kepentingan dari kedua belah pihak.

Tiongkok menyadari bahwa dunia yang terglobalisasi dan saling terhubung, dimana rantai pasokan yang terintegrasi, arus barang, jasa, dan lintas batas yang konstan serta konektivitas orang ke orang yang menguat mengakibatkan semakin rentannya kondisi saat ini dengan pandemi. Sehingga Tiongkok mempersiapkan kemungkinan terburuk tersebut dengan

membentuk inisiatif HSR, yang mendapatkan momentum yang tepat untuk di implementasikan di masa pandemi Covid-19 ini. Inisiatif ini turut menggandeng Indonesia sebagai negara anggota BRI dalam mengatasi permasalahan Covid-19 secara bersama-sama melalui kerangka kerja sama bilateral dengan melakukan diplomasi kesehatan dalam bentuk bantuan luar negeri untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penulis menggunakan beberapa ulasan penelitian yang memiliki relevansi dengan diplomasi kesehatan yang dilakukan Tiongkok kepada Indonesia di era penyebaran Covid-19 dengan tujuan untuk memperkaya informasi dan memperjelas perbedaan di antara *literature review* yang digunakan. Oleh karena itu, penulis menggunakan tiga *literature review* yang akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

Penelitian yang pertama, yaitu Kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang ditulis oleh Ahmad Faroq Mulya pada tahun 2022. Penelitian oleh Ahmad Faroq membahas mengenai hubungan Tiongkok-Indonesia dan kerjasama kedua negara dalam menanggulangi pandemi covid-19 berupa pengiriman bantuan kesehatan, serta keuntungan kedua negara dalam menjalin kerjasama tersebut. Adapun kesamaan penelitian oleh Ahmad Faroq dengan tulisan ini adalah membahas terkait bantuan yang diberikan Tiongkok kepada Indonesia dalam menghadapi pandemi Covid-19 berupa bantuan alat kesehatan. Selain kesamaan, terdapat pula perbedaan dalam penelitian oleh Ahmad Faroq dengan tulisan ini. Dalam penelitian Ahmad

Faroq, hanya membahas kerjasama pemberian bantuan alat kesehatan untuk penanganan Covid-19 antara Indonesia dengan Tiongkok beserta strateginya. Sedangkan, dalam tulisan ini membahas lebih luas bantuan kesehatan yang diberikan Tiongkok kepada Indonesia dalam menanggulangi pandemi Covid-19 termasuk kepentingan dibalik pemberian bantuan tersebut berupa kepentingan ekonomi dan politik.

Penelitian yang kedua, yaitu *Managing Common Security: Indonesia-China Cooperation in Handling Covid-19 Pandemic* yang ditulis oleh Marten Hanura, dkk pada tahun 2022. Penelitian oleh Marten membahas tentang perkembangan bilateral Indonesia-Tiongkok dalam penanganan Covid-19 serta menjelaskan aspek-aspek kerjasama keduanya. Adapun kesamaan antara penelitian oleh Marten dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas salah satu aspek kerjasama berupa pemberian bantuan alat kesehatan. Akan tetapi, terdapat pula perbedaan antara penelitian oleh Marten dengan tulisan ini, penelitian oleh Marten hanya sebatas membahas aspek-aspek kerjasama kedua negara dalam menanggulangi pandemi Covid-19 sedangkan tulisan ini membahas aspek kerjasamanya beserta tantangan yang dihadapi Tiongkok dalam memberikan bantuan penanganan covid-19 di Indonesia.

Penelitian yang ketiga, yaitu *Influence of the Covid-19 Pandemic in Indonesian and China Trade Relations* yang ditulis oleh Nugroho Ari Pamungkas pada tahun 2022. Penelitian ini membahas mengenai dampak Covid-19 terhadap hubungan Tiongkok-Indonesia terutama dalam bidang

ekonomi khususnya kegiatan ekspor dan import. Adapun kesamaan penelitian oleh Nugroho dengan tulisan ini adalah keduanya sama-sama membahas hubungan baik Tiongkok-Indonesia di tengah wabah pandemi Covid-19, yang mana disebutkan bahwa hubungan Tiongkok dengan Indonesia di era kepemimpinan Joko Widodo terlihat semakin dekat dengan adanya berbagai kerja sama yang dilakukan selama pandemi Covid-19. Selain kesamaan terdapat pula perbedaan antara penelitian oleh Nugroho dengan tulisan ini, penelitian oleh Nugroho hanya fokus membahas mengenai dampak Covid-19 terhadap hubungan kerjasama ekonomi Tiongkok-Indonesia terutama kegiatan ekspor dan impor, sedangkan tulisan ini membahas terkait alasan Tiongkok melakukan kerja sama penanganan Covid-19 dengan Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam melakukan kerjasama tersebut.

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

<b>JUDUL / PENULIS</b>	<b>FOKUS PENELITIAN</b>	<b>TEMUAN / KESIMPULAN</b>
<b>Kerjasama Indonesia-Tiongkok dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19</b> oleh Ahmad Faroq Mulya	Membahas mengenai hubungan Tiongkok-Indonesia dan kerja sama kedua negara dalam menanggulangi pandemi Covid-19 berupa pengiriman bantuan kesehatan, serta keuntungan kedua negara dalam menjalin kerja sama tersebut.	Indonesia dan Tiongkok menjalin kerja sama bilateral untuk menanggulangi pandemi Covid-19 dengan pengiriman bantuan kesehatan oleh Tiongkok kepada Indonesia sebanyak 5 kali dengan pengiriman secara bertahap. Dari pengiriman bantuan kesehatan tersebut kedua negara memperoleh keuntungan. Dimana, tingkat ekspor Tiongkok di bidang kesehatan meningkat pesat sedangkan untuk Indonesia dari bantuan kesehatan tersebut menjadi keuntungan investasi pada bidang kesehatan serta berperan dalam membantu menekan jumlah kasus Covid-19.
<i>Managing Common Security:</i>	Membahas tentang perkembangan bilateral	Pada masa pandemi Covid-19 Tiongkok dan Indonesia menjalin hubungan kerja

<p><b><i>Indonesia-China Cooperation in Handling Covid-19 Pandemic</i></b> ditulis oleh Marten Hanura, dkk</p>	<p>Indonesia-Tiongkok dalam penanganan Covid-19 serta menjelaskan aspek-aspek kerja sama keduanya.</p>	<p>sama untuk tujuan pemulihan ekonomi masing-masing negara. Kerja sama tersebut meliputi bantuan vaksin peralatan medis, yang kemudian berdampak pada peningkatan kerjasama ekonomi serta laju perdagangan kedua negara.</p>
<p><b><i>Influence of the Covid-19 Pandemic in Indonesian and China Trade Relations</i></b> oleh Nugroho Ari Pamungkas</p>	<p>Membahas mengenai dampak Covid-19 terhadap hubungan Tiongkok-Indonesia terutama dalam bidang ekonomi khususnya kegiatan ekspor dan impor</p>	<p>Bahwa pandemi Covid-19 telah mengakibatkan penurunan ekspor dan impor antara Indonesia dan Tiongkok terutama dari Desember 2019 hingga Maret 2020 sehingga berdampak pada penurunan hubungan dagang antar dua negara.</p>